



POTRET AWAL PERSELISIHAN HASIL PEMILU 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh : Tim Peneliti Perludem





Latar Belakang



- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- Data yang diidentifikasi merupakan data yang berhasil diakses melalui Website MK pada Minggu, 24 Maret 2024 Pukul 16.20 Wib
- Batas waktu pengajuan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi
 1. PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah 3 Hari setelah Penetapan perolehan suara oleh KPU pada 20 Maret 2024 yakni 21-23 Maret 2024 Pukul 24.00 Wib.
 2. PHPU Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) adalah 3 X 24 Jam sejak Penetapan perolehan suara oleh KPU pada 20 Maret 2024 Pukul 22.19 dan batas waktu mengajukan PHPU yakni 23 Maret 2024 Pukul 22.19 Wib.
- Pengawasan terhadap PHPU merupakan upaya yang penting untuk menjaga PHPU Pemilu 2024 dilaksanakan secara terbuka dan akuntable serta tidak melanggar Sapta Karsa Utama Mahkamah Konstitusi (lambannya data softfile permohonan berdampak minimnya pemantauan oleh publik)
- Memastikan PHPU diselesaikan oleh MK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan
 1. 14 Hari Sejak diterimanya Permohonan Perkara PHPU Pilpres di MK
 2. 30 Hari Kerja sejak dicatatkan dalam e-BRPK MK untuk Perkara PHPU Pileg

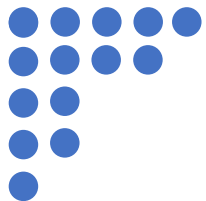
Perkara Presiden/Wakil Presiden

NO	TANGGAL	PERMOHONAN/PERKARA	PARA PIHAK	KUASA	FILE	PUTUSAN
1	Kamis, 21 Maret 2024 00:58:00 WIB (Online)	PHP Umum Presiden dan Wakil Presiden APPP Nomor : 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024 Registrasi Nomor :	<u>Pemohon:</u> H.ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D & Dr. (H.C) H.A.MUHAIMIN ISKANDAR	<u>Kuasa Pemohon:</u> Dr. Ari Yusuf Amir, S.H., M.H. Sugito, S.H., M.H. Zaid Mushafi, S.H., M.H.		
			<u>Termohon:</u> KPU RI	<u>Kuasa Termohon:</u>		
			<u>Pihak Terkait:</u>	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u>		
2	Sabtu, 23 Maret 2024 16:53:40 WIB	PHP Umum Presiden dan Wakil Presiden APPP Nomor : 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024 Registrasi Nomor :	<u>Pemohon:</u> H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. dan PROF. DR. H. M. MAHFUD MD, S.H., S.U., M.I.P.	<u>Kuasa Pemohon:</u> Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M. Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H. Prof. Dr. Todung M. Lubis, S.H., LL.M.		
			<u>Termohon:</u> KPU RI	<u>Kuasa Termohon:</u>		
			<u>Pihak Terkait:</u>	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u>		

Perkara DPR/DPRD

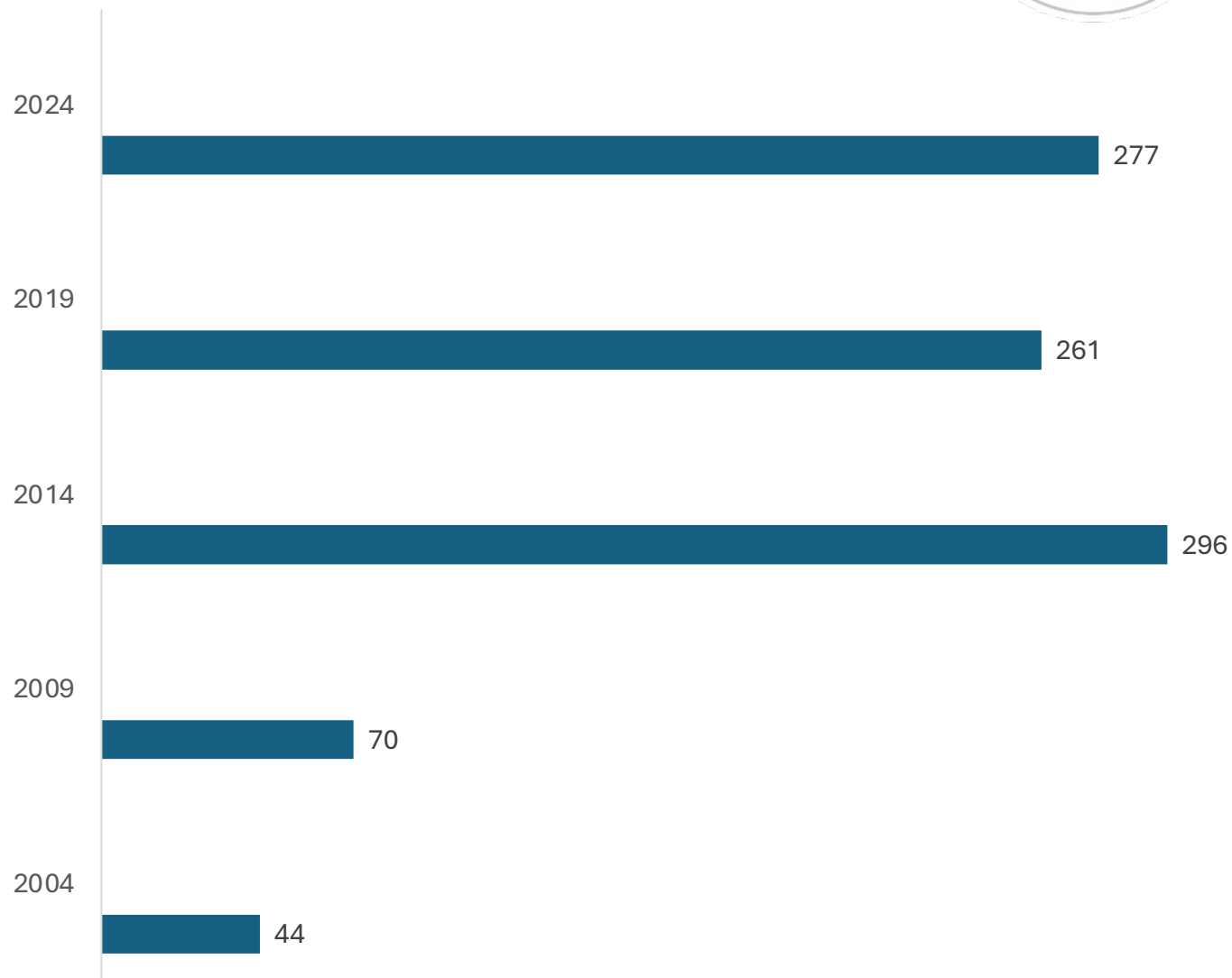
Pencarian: Cari

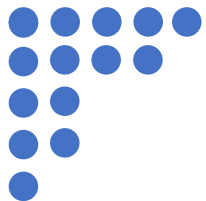
NO	TANGGAL	PERMOHONAN/PERKARA	PARA PIHAK	KUASA	FILE	PUTUSAN
1	Kamis, 21 Maret 2024 22:27:45 WIB	PHP Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU TENGAH 3 Tahun 2024 APPP Nomor : 01-02-12-31/AP3-DPRD/Pan.MK/03/2024 Registrasi Nomor :	<u>Pemohon:</u> Nurmiati La Abusaleh	<u>Kuasa Pemohon:</u> Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H. Nu Fadly Danial, S.H. Muhammad Amril Imran, S.H.		
			<u>Termohon:</u> KPU RI	<u>Kuasa Termohon:</u>		
			<u>Pihak Terkait:</u>	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u>		
2	Jumat, 22 Maret 2024 11:44:25 WIB	PHP Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil MUARA ENIM 5 Tahun 2024 APPP Nomor : 02-02-10-06/AP3-DPRD/Pan.MK/03/2024 Registrasi Nomor :	<u>Pemohon:</u> Abrianto, S.E.	<u>Kuasa Pemohon:</u> Randu Yantori, S.H., Mujaddid Islam, S.H., M.H., C.L.A., M. Jayanto, S.H., M.H.,		
			<u>Termohon:</u> KPU RI	<u>Kuasa Termohon:</u>		
			<u>Pihak Terkait:</u>	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u>		
3	Jumat, 22 Maret 2024 13:05:14 WIB (Online)	PHP Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 APPP Nomor : 04-02-04-11/AP3-DPRD/Pan.MK/03/2024	<u>Pemohon:</u> RONNY BARA PRATAMA	<u>Kuasa Pemohon:</u> AHMAD YAZDI, S.H., M.H.		
			<u>Termohon:</u>	<u>Kuasa Termohon:</u>		



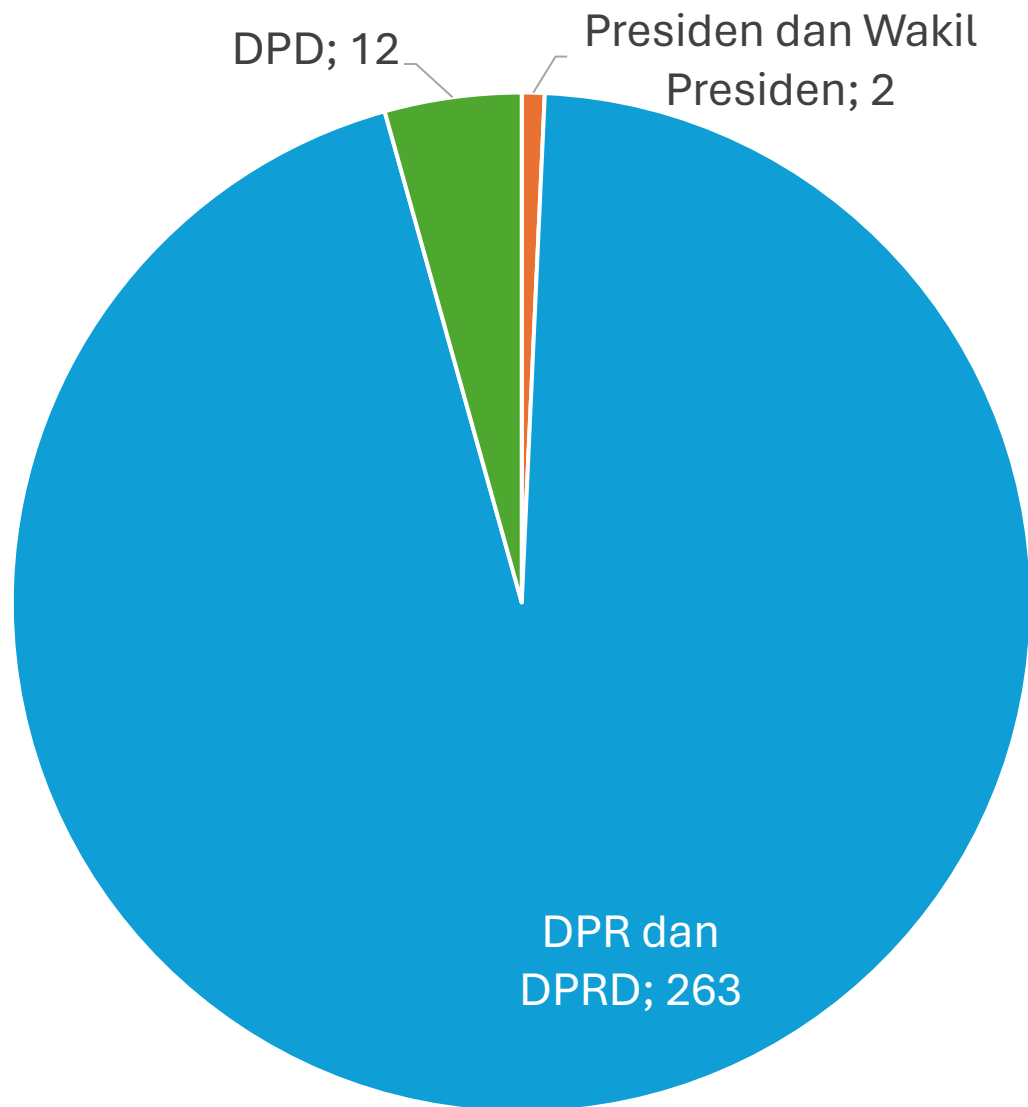
Jumlah Perkaras PHPU 2004-2024

- Perkara PHPU di 2024 mengalami peningkatan dari Pemilu 2019;
- Peningkatan perkara ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 masih diwarnai dengan dugaan pelanggaran dan kecurangan yang berdampak pada hasil pemilu;
- Penyelenggara pemilu gagal memitigasi risiko di pemilu 2024 (serentak 5 kotak ke dua)



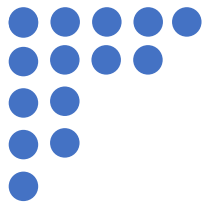


Jumlah Sengketa Berdasarkan Jenis Pemilu



MK menerima setidaknya 277 Perkara Permohonan PHPU di Pemilu 2024 dengan rincian :

- 263 perkara atau 95% perkara yang masuk merupakan perkara Pemilu DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota;
- 12 perkara atau 4 % perkara yang masuk merupakan perkara untuk Pemilu DPD; dan
- 2 perkara atau 1 % perkara yang masuk merupakan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden

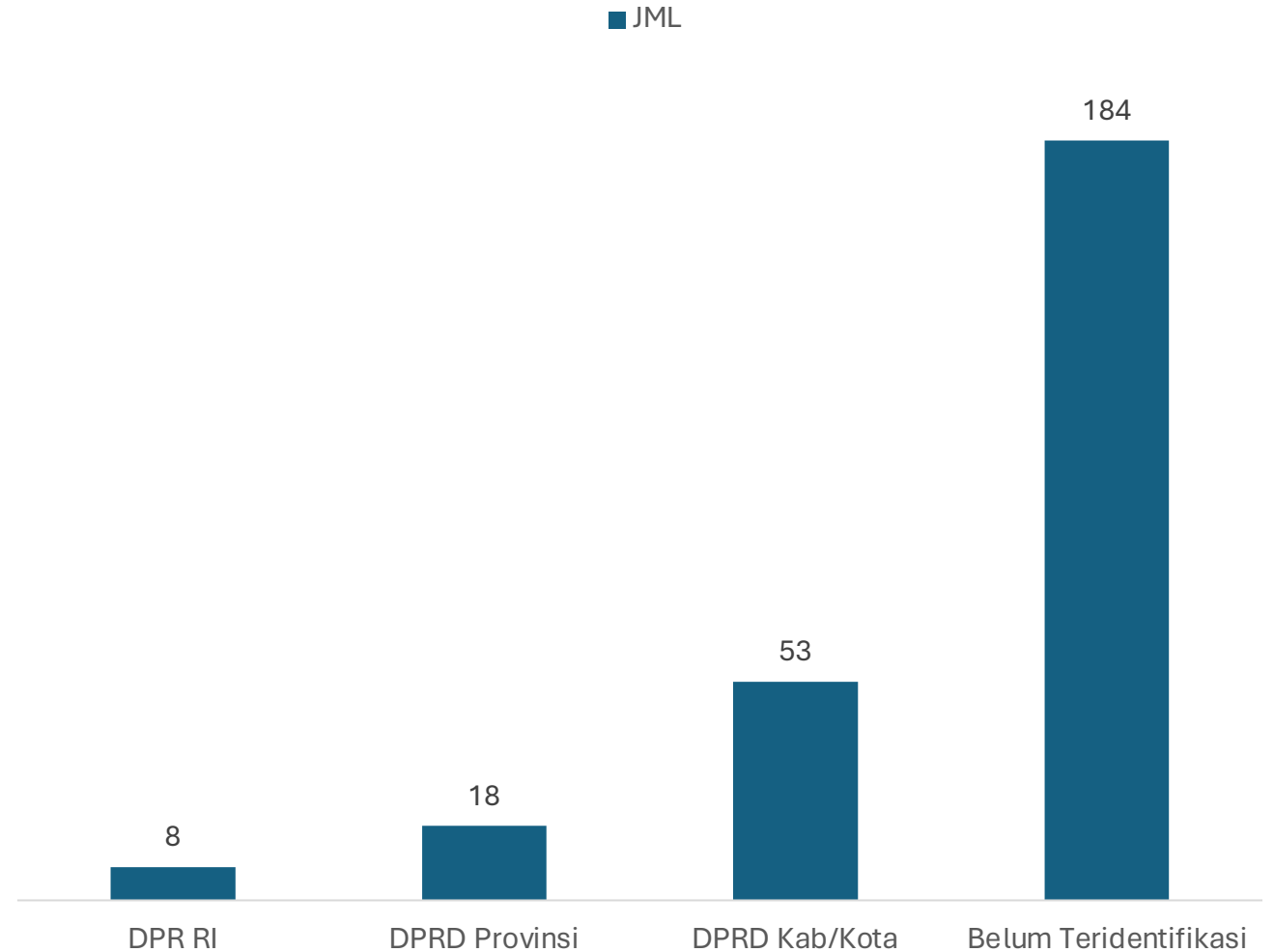


Jumlah Sengketa Berdasarkan Jenis Pemilu



Dari 263 perkara atau 95% perkara yang masuk untuk Pemilu DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota;

- 184 perkara belum dapat diidentifikasi masuk ke dalam jenis pemilihan yang mana karena minimnya informasi di dalam website MK;
- 53 perkara merupakan perkara DPRD Kabupaten/Kota;
- 18 perkara merupakan perkara DPRD Provinsi; dan
- 8 perkara merupakan perkara DPR RI.





Provinsi Terbanyak Berdasarkan Jumlah Sengketa Hasil Pemilu DPR dan DPRD

No	Provinsi Terjadi Sengketa	Jumlah Perkara
1	Papua Tengah	21
2	Aceh	17
3	Sumatera Selatan	16
4	Papua	15
5	Jawa Barat	14
6	Jawa Timur	12
7	Papua Pegunungan	11
8	Maluku Utara	10
9	Maluku	10

No	Provinsi Terjadi Sengketa	Jumlah Perkara
10	Sumatera Utara	9
11	NTB	9
12	Banten	9
13	Sulawesi Utara	8
14	Riau	8
15	Papua Barat	7
16	DKI Jakarta	7
17	Papua Barat Daya	5
18	Jawa Tengah	5
19	Gorontalo	5

20	Sumatera Barat	4
21	Sulawesi Tengah	4
22	Papua Selatan	4
23	Kalimantan Barat	4
24	Sulawesi Selatan	3
25	Jambi	3
26	Sulawesi Tenggara	2
27	Sulawesi Barat	2
28	Lampung	2
29	Kepulauan Riau	2
30	Kepulauan Bangka Belitung	2
31	Kalimantan Timur	2
32	Kalimantan Selatan	2
33	Yogyakarta	1
34	Kalimantan Utara	1
35	Kalimantan Tengah	1
36	Bengkulu	1
37	Belum Teridentifikasi	25
	Grand Total	263

- Dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia Papua Tengah merupakan provinsi dengan jumlah perkara terbanyak yang tersebar diberbagai jenis pemilihan yakni 21 perkara, disusul oleh Aceh, Sumatera Selatan, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua Pegunungan, Maluku Utara dan Maluku.
- Sedangkan, hanya Bali dan NTT yang tidak ada sengketa di Pileg DPR dan DPRD



Permohonan PHPU Pileg DPR dan DPRD Serta Restu DPP Partai Terhadap Pemohon Perseorangan



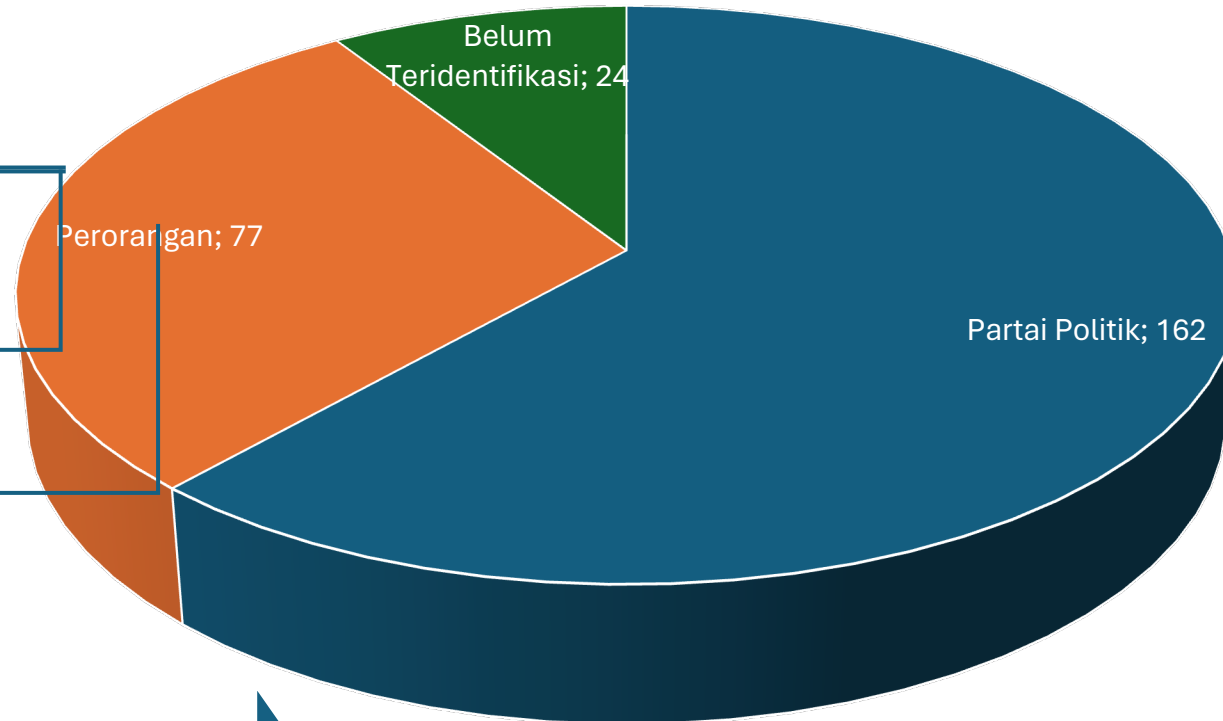
41 Perkara diajukan *belum/tidak mendapatkan rekomendasi* dari DPP Parpol

32 Caleg mendapatkan rekomendasi

MK tidak boleh menerapkan rekomendasi dari DPP Parpol sebagai syarat mutlak

66 Caleg Laki-Laki

11 Caleg Perempuan



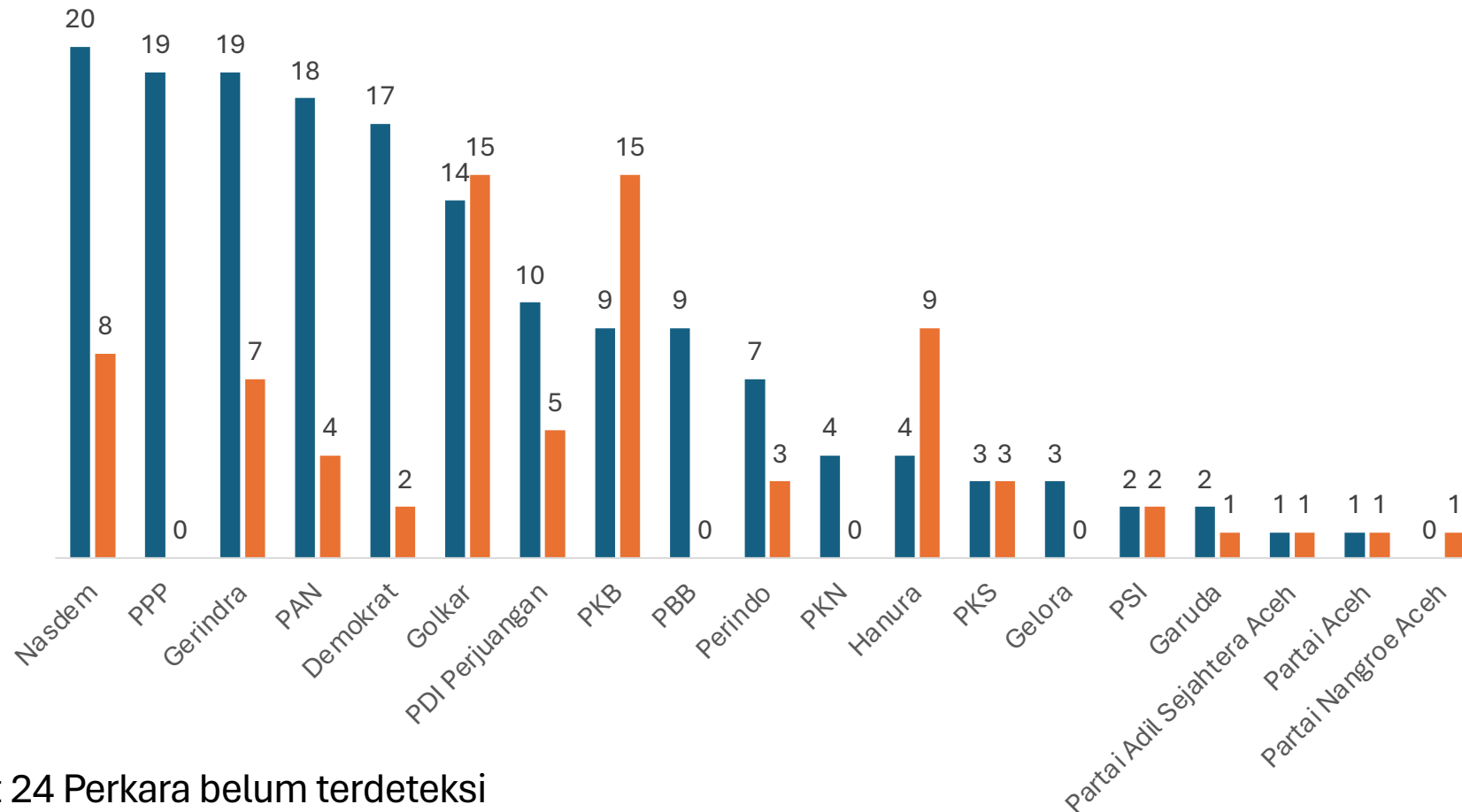
- Dari 263 Perkara Pileg DPR dan DPRD, Partai Politik masih menjadi pemohon dominan dengan 162 permohonan perkara diajukan oleh Partai.
- Sedangkan 77 perkara diajukan oleh perorangan (caleg) dan 24 belum teridentifikasi apakah diajukan oleh partai atau perseorangan



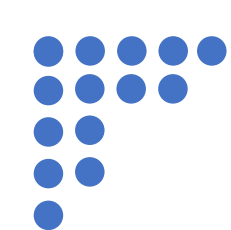
Perbandingan Permohonan PHPU Pileg DPR dan DPRD Berdasarkan Pemohon Partai Politik dan Perorangan



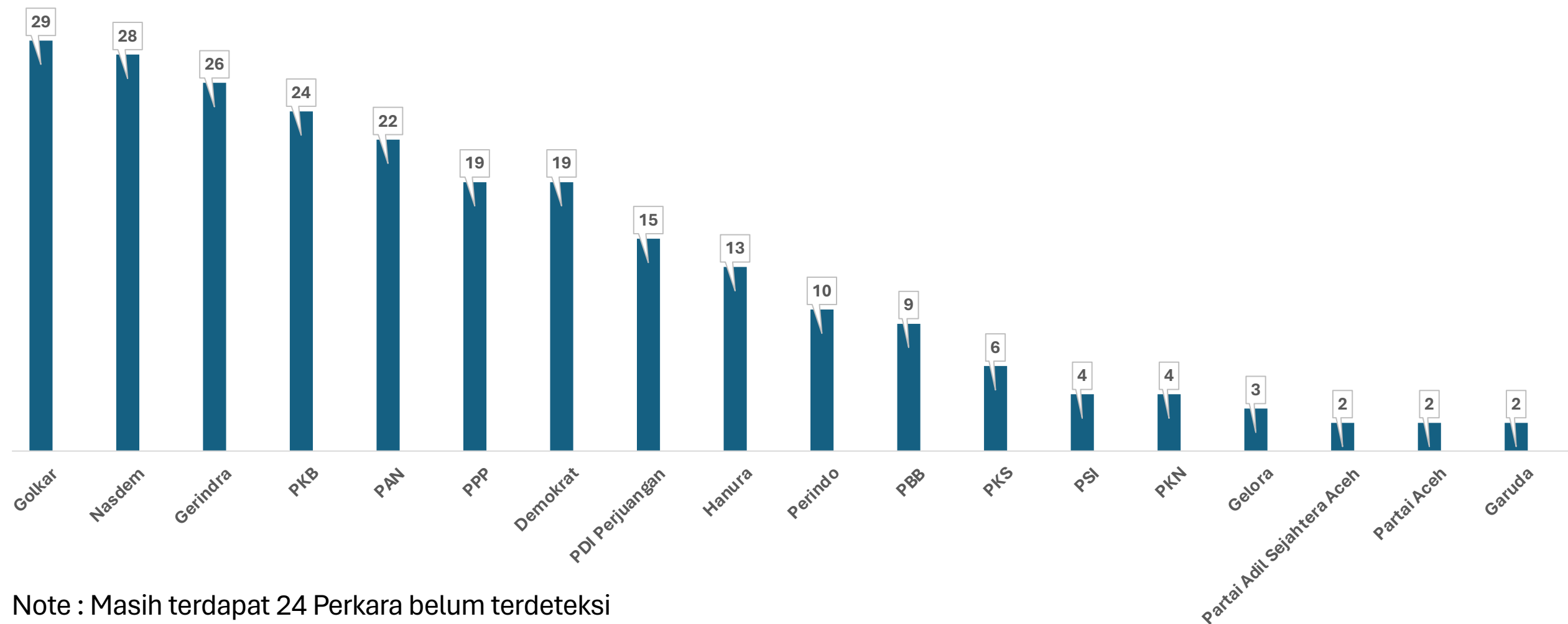
■ Parpol ■ Perorangan



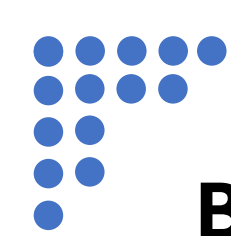
Note : Masih terdapat 24 Perkara belum terdeteksi



Jumlah Permohonan PHPU Pileg DPR dan DPRD Berdasarkan Partai Politik



Note : Masih terdapat 24 Perkara belum terdeteksi



Batas Waktu Pengajuan Sengketa Hasil Pemilu



Jenis Pemilu	1 Hari	2 Hari	3 Hari	>3 Hari
Pilpres	1 Perkara	-	1 Perkara	-
DPR dan DPRD	1 Perkara	7 Perkara	247 Perkara	10 Perkara
DPD	-	2 Perkara	7 Perkara	2 Perkara



Provinsi Terbanyak Berdasarkan Jumlah Sengketa Hasil Pemilu DPD RI



Provinsi Terjadi Sengketa	Jumlah Perkara
Riau	2
Papua Selatan	2
Papua Tengah	2
Sumatera Barat	1
Sumatera Utara	1
NTT	1
NTB	1
Maluku	1
Kalimantan Utara	1
Grand Total	11

Meskipun sengketa DPD tidak banyak, namun terdapat temuan menarik yakni salah perkara diajukan oleh Bakal Calon Anggota DPD dari Sumatera Barat yang juga merupakan Mantan Terpidana Korupsi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena tidak melewati masa jeda 5 Tahun saat pencalonan DPD